



**EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DESA CISIMEUT  
KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK BANTEN  
(Periode Tahun 2021)**

Skripsi

Dibuat Oleh :

Ega Permatasari

(022118299)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS PAKUAN**

**BOGOR**

**2022**

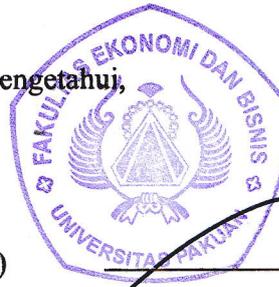
**EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DESA CISIMEUT  
KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK BANTEN  
(Periode Tahun 2021)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program  
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak.,M.M.,CA.)



*[Handwritten signature]*

Ketua Program Studi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak.,MBA.,  
CMA.,C.A.,CSEP.,QIA)

*[Handwritten signature]*

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DESA CISIMEUT  
KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK BANTEN  
(Periode Tahun 2021)**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari : Jumat, 01 Juli 2022

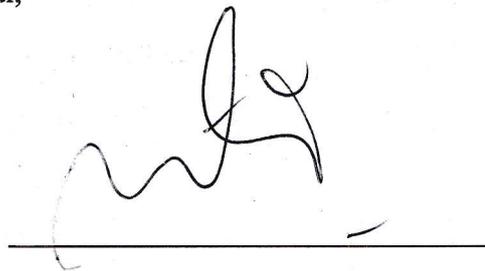
Ega Permatasari

022118299

diketahui,

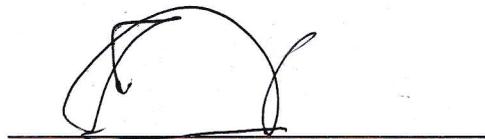
Ketua Penguji

(Dr. Retno Martanti Endah Lestari,  
SE.,MSi.,CMA.,CAPM)



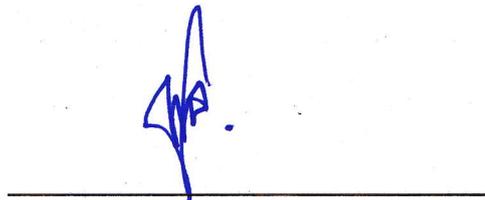
Ketua Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Yohanes Indrayono,  
Ak.,MM,CA)



Anggota Komisi Pembimbing

(Agung Fajar Ilmiyono, SE.,M.Ak.,  
AWP.,CTCP.,CFA.,CNPHRP.,CAP)



## Pernyataan Pelimpahan Hak Cipta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ega Permatasari  
Nomor Pokok Mahasiswa : 022118299  
Konsentrasi Skripsi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Cisimeut Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten (Periode Tahun 2021).

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 01 Juli 2022



Ega Permatasari

022118299

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Pakuan, tahun 2021 Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagai atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan satu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

EGA PERMATASARI. 022118299. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Cisimeut Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten (Periode Tahun 2019). Di bawah bimbingan: YOHANES INDRAYONO dan AGUNG FAJAR ILMIYONO. 2022.

Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Faktor yang menjadi penghambat pembangunan fisik di Desa Cisimeut adalah kurangnya alokasi anggaran yang di terima dan telatnya penyaluran anggaran dari pusat.

Penelitian ini dilakukan pada Desa Cisimeut Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifitasan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang diolah menggunakan perhitungan presentasi rasio efektifitas pengelolaan Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghitung perbandingan realisasi dana desa dengan target belanja dana desa dikalikan 100%.

Hasil penelitian ini sesuai dengan indikator pengukuran dengan menggunakan rumus rasio efektivitas, bahwa dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan fisik Desa Cisimeut sudah dikelola secara efektif karena dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio dapat mencapai angka 100%.

Kata Kunci : Dana Desa dalam Pembangunan Fisik Desa

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat, kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan semaksimal mungkin yang berjudul “**Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Cisimeut Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten (Periode Tahun 2021)**”. Shalawat dan salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Penyusunan skripsi merupakan salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Selama penyusunan skripsi ini begitu banyak pihak yang telah bersedia terlibat dalam membantu untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, petunjuk, arahan, bimbingan, saran dari berbagai pihak dan tidak lepas dari doa dan dukungan keluarga penulis yang selalu percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas dan tulus akan membuahkan hasil yang indah. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan jalan terbaik untuk penulis selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
2. Kedua orang tua saya yang tercinta yaitu Ayahanda Bapak Jakaria dan Ibunda Nurwati serta keluarga besar yang selalu menyertai penulis dengan ketulusan doa-doa yang tiada henti dan telah memberikan semangat, motivasi, nasihat, dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak.,M.M.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E.,M.Si.,CMA.,CAPM.,CAP. selaku wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang selalu memberi pengarahan dan motivasi.
5. Bapak Dr Arief Tri Hardiyanto, Ak.,MBA.,CMA.,C.A.,CSEP.,QIA. selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

6. Bapak Prof. Yohanes Indrayon, Ak.,MM.,C.A. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membantu serta memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Agung Fajar Ilmiyono S.E., M.Ak., AWP., CTCP., CFA., CNPHRP., CAP. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membantu serta memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Staf Tata Usaha dan Pelaksanaan Universitas Pakuan yang telah memberikan informasi dan membantu segala keperluan penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan di Program Studi Akuntansi, terutama Tarisya Rizki Putri K, Aqso Muhammad Kandiaz yang telah rela meluangkan waktunya untuk menemani, menyemangati, membantu penulis tiada henti dalam hal apapun yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan selalu direpotkan oleh penulis dalam masa perkuliahan serta dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada Dahlia Zulka terimakasih banyak atas bantuan, semangat, waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat hati Lubis Anggara yang selalu memberikan support dan semangat yang tiada henti dengan hal apapun kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Khairul Akbar, Ajeng Dea Fany, dan Amelia Rahma yang telah membantu, membri semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2018, khususnya kelas E Akuntansi yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan.
14. Teman-teman semasa kuliah yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani semasa perkuliahan.
15. Pihak Desa Cisimeut yang telah membantu dan memberi data, informasi di tengah-tengah waktu kesibukannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun telah memberikan dukungan semangat kepada penulis.

Penulis memanjatkan doa bagi pihak yang disebutkan serta pihak-pihak lain yang telah membantu namun tidak dapat disebutkan dalam kesempatan ini, semoga Allah SWT memberikan anugerah dan barokah atas semua amal baik yang telah

diberikan dan dilakukan selama ini, amin yarobbal alamin. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan penulis secara khusus. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, semoga kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang, dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca. Oleh karena itu mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan “Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh”.

Bogor, 01 Juli 2022

Penulis,

Ega Permatasari

## DAFTAR ISI

JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iii
LEMBAR HAK CIPTA.....	iv
ABSTRAK.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Maksud Penelitian.....	7
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Akademis.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Akuntansi Sektor Publik.....	9
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	9
2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	10
2.1.3 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik.....	10

2.1.4 Peran Akuntansi Sektor Publik .....	10
2.1.5 Akuntansi Pemerintahan .....	11
2.1.6 Standar Akuntansi Pemerintahan .....	11
2.2 Transfer Daerah dan Dana Desa .....	12
2.2.1 Pengelolaan Dana Desa.....	12
2.2.2 Pendapatan Desa .....	13
2.2.3 Tujuan Dana Desa .....	15
2.2.4 Manfaat Dana Desa .....	16
2.2.5 Konsep Dana Desa .....	16
2.2.6 Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Desa.....	16
2.2.7 Asas Pengelolaan Keuangan Desa .....	18
2.2.8 Pembangunan Desa .....	19
2.2.9 Pembangunan Fisik .....	19
2.2.10 Kebijakan Dana Desa.....	20
2.3 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran .....	21
2.3.1 Penelitian Terdahulu .....	21
2.3.2 Kerangka Pemikiran.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Objek Unit Analisis dan Lokasi Penelitian .....	27
3.3 Jenis dan Sumber Penelitian .....	27
3.4 Operasionalisasi Variabel.....	28
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	29
3.6 Metode Pengolahan Data dan Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
4.1.1 Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	32
4.1.2 Sarana dan Prasarana Desa Cisimeut .....	33
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cisimeut.....	34
4.2 Analisis Variabel.....	37
4.3 Pembahasan Dan Interpretasi Hasil Penelitian.....	45

4.3.1 Hasil Analisis Kualitatif .....	45
4.3.2 Hasil Analisis Kuantitatif .....	46
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	49
5.1 Kesimpulan .....	49
5.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	54
LAMPIRAN.....	55

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Hasil Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa Cisimeut .....	2
Tabel 1. 2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Desa Cisimeut Tahun Anggaran 2021 .....	3
Tabel 1. 3 Laporan Realisasi dan Rencana Anggaran Belanja Desa Cisimeut Tahun Anggaran 2021 .....	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 2. 2 Matriks Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel .....	28
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Cisimeut.....	32
Tabel 4. 2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Cisimeut.....	32
Tabel 4. 3 Sarana dan Prasarana Desa Cisimeut .....	33
Tabel 4. 4 Rencana Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Cisimeut Tahun Anggaran 2021 .....	38
Tabel 4. 5 Usulan RKPDesa Pembangunan Desa Cisimeut Tahun 2021 .....	40
Tabel 4. 6 Pembangunan Fisik Desa yang Terlaksana di Desa Cisimeut Tahun 2021 .....	42
Tabel 4. 7 Alokasi Anggaran Dana Desa Pembangunan Perkerasan Jalan.....	43
Tabel 4. 8 Alokasi Anggaran Dana Desa Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok.....	43
Tabel 4. 9 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa Cisimeut Tahun Anggaran 2021 .....	44
Tabel 4. 10 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Cisimeut Tahun 2021 .....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Tingkat Pendapatan Desa Cisimeut Tahun 2021 .....	3
Gambar 1. 2 Diagram Belanja Desa Cisimeut Tahun 2021 .....	6
Gambar 2. 1 Konstelasi Penelitian .....	26
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cisimeut .....	35

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi APBDesa Pemerintah Desa Cisimeut Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 .....	56
Lampiran 2 Usulan RKPDesa Pembangunan Desa Cisimeut Tahun 2021 .....	57
Lampiran 3 Pembangunan Fisik Desa yang Terlaksana di Desa Cisimeut Tahun 2021.....	58
Lampiran 4 Dokumentasi.....	60

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi Covid-19 yang menyerang berbagai Negara di seluruh dunia menyebabkan berbagai dampak negatif bagi seluruh sektor industri. Pada awal tahun 2020, Indonesia menjadi salah satu Negara terdampak Covid-19. Salah satu sektor yang terkena dampak besar adalah pemerintahan. Pemerintah berusaha mencari berbagai macam cara untuk memerangi pandemi khususnya di bidang keuangan. Karena krisis yang berlebih dan adanya pembatasan mobilitas masyarakat di tengah pandemi menyebabkan berkurangnya pendapatan yang didapatkan pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal ini berdampak pula terhadap pendapatan dana transfer yang diterima oleh desa.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, tugas penataan desa serikat pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diimbun secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri sesuai perundangan. Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana masing-masing daerah diberikan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk memberikan keluasan kepada daerah dalam pembangunan daerah serta dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta partisipasi masyarakat, otonomi luar diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Didalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan akan sangat bergantung pada kesiapan desa dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Sebagai dasar yang berkembang di Desa Cisimeut terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1

## Hasil Pembangunan sarana dan prasarana Desa Cisimeut

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Kantor Desa	1	Unit
2	Masjid	9	Unit
3	Mushola	12	Unit
4	TPU	3	Unit
5	Poskamling	33	Unit
6	Paud	1	Unit
7	SD/Sederajat	2	Unit
8	SMP/Sederajat	1	Unit
9	SMA/Sederajat	1	Unit
10	Puskesmas Pembantu (PUSTU)	1	Unit
11	Posyandu	7	Unit
12	Jalan Aspal Pnetrasi	1200	$M^2$
13	Jalan Sirtu/Koral	2900	$M^2$
14	Jalan Rabet Beton	150	$M^2$
15	Jalan Tanah	1100	$M^2$

Pemerintahan desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan desa dan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang jauh lebih luas. Untuk itu pembanguna pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumber daya ekonominya

sendiri secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Terbitnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menunjukkan peran dan kemampuannya untuk ikut membangun pemerintahan Indonesia.

Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan posisi target anggaran dan realisasi anggaran pendapatan transfer Desa Cisimeut, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tahun anggaran 2021:

Gambar 1. 1

Diagram Tingkat Pendapatan Desa Cisimeut Tahun 2021



Sumber: Laporan Keuangan Desa Cisimeut

Dapat dilihat dari diagram tersebut pada tahun 2021 Desa Cisimeut mendapatkan pendapatan sesuai dengan target penerimaan. Dalam pendapatan Desa, desa cisimeut mendapatkan dana-dana yang terdiri dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan uraian dari pendapatan Desa Cisimeut, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021:

Tabel 1. 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Desa Cisimeut Tahun Anggaran 2021

Keterangan	Anggaran	Realisasi
<b>Pendapatan Asli Desa</b>		
Hasil Usaha	4.500.000	4.500.000
<b>Pendapatan Transfer</b>		
Dana Desa	852.523.000	852.523.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	55.572.410	55.572.410

Alokasi Dana Desa	354.312.700	354.312.700
Bantuan Keuangan Provinsi	15.000.000	15.000.000
Bantuan Keuangan Kabupaten	325.000.000	325.000.000
<b>Pendapatan Lain-lain</b>		
Bunga Bank	1.711.460	630.613
Pengembalian	-	1.000.000
<b>TOTAL PENDAPATAN DESA</b>	<b>1.608.619.570</b>	<b>1.608.538.723</b>

Sumber: Laporan Keuangan Desa Cisimeut

Kementerian keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan April 2020 mencapai Rp 241,45 triliun atau setara 31,66% dari pagu APPBN-Perpres 54/20. Posisi ini lebih rendah Rp 21 triliun atau setara 8,04% dari tahun sebelumnya. Penurunan TKDD yang terjadi pada bulan April tahun 2020 ini disebabkan oleh dampak mewadahnya pandemi Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini mempengaruhi kinerja penyaluran TKDD di setiap daerah di Indonesia.

Rendahnya realisasi TKDD di sebabkan karena realisasi DID lebih rendah sebesar 55,11% dibandingkan tahun sebelumnya karena belum optimalnya realisasi DID pada triwulan I. Pemerintah daerah selaku pihak yang menerima alokasi DID masih melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020.

Beberapa hal yang mempengaruhi realisasi TKDD, di antaranya pagu Dana Bagi Hasil (BBH) yang turun sebesar Rp 106,4 triliun, menyesuaikan dengan turunnya proyeksi penerimaan sesuai Perpres 54 tahun 2020. Dana Aloksi Umum (DAU) turun akibat beberapa daerah yang belum memenuhi syarat penyaluran Laporan Penyesuaian APBD atas Refocusing atau Realokasi Anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 384,4 triliun dari sebelumnya Rp 417,9 triliun. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang naik dari Rp 69,3 triliun menjadi Rp 183 triliun, hal ini berkaitan dengan kesiapan teknis daerah untuk pelaksanaan DAK fisik yang semakin baik sehingga dapat lebih cepat menyatakan kontrak. Sementara itu DAK non-fisik menurun yang diakibatkan oleh adanya perubahan mekanisme penyaluran BOS.

Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menganggarkan sebesar Rp 60 triliun, yang terrealisasi sebesar Rp 59,86 triliun atau 98,77%. Kemudian pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp 70 triliun dengan realisasi Dana Desa yang telah dikucurkan hingga Agustus tahun 2019 mencapai Rp 42,2 triliun atau asetara dengan 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi sebesar Rp 72 triliun. Dana Desa tersebut ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 Provinsi dengan jumlah Desa mencapai 74 ribu Desa. Dilihat dari rata-rata Dana Desa yang diterima per Desa selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Tahun 2018

setiap Desa mendapat rata-rata alokasi Dana Desa sebesar Rp 800,4 juta, tahun 2019 mendapatkan sebesar Rp 933,9 juta, dan pada tahun 2020 sebesar Rp 960,6 juta. Dana Desa yang di alokasikan pada tahun 2020 sebesar Rp 72 triliun diperuntukan untuk 74.953 Desa dan akan disalurkan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dengan Dana Desa yang telah dialokasikan oleh Pemerintah, maka diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat maupun tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan Desa yang didalamnya terdapat Dana Desa.

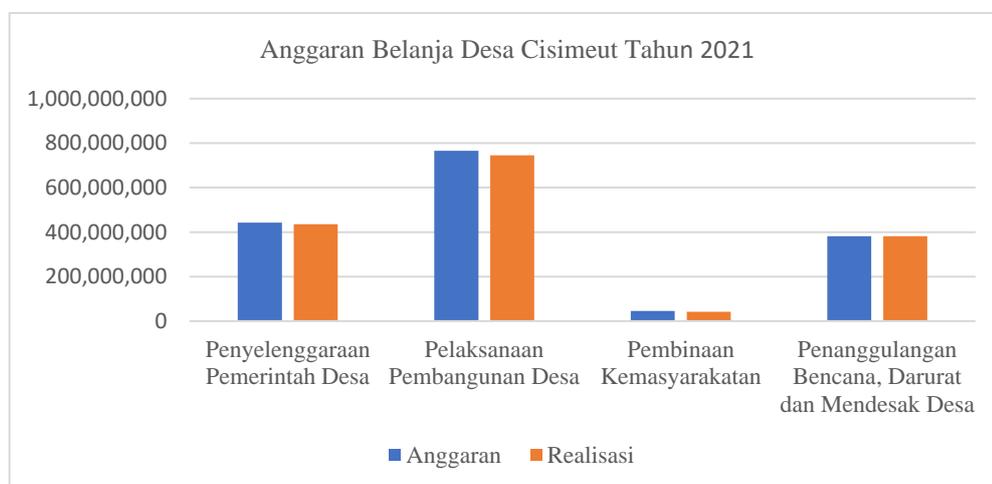
Dana yang dibutuhkan bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan permasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa. Kehadiran Undang-Undang tentang Desa merupakan penguatan tentang status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran Undang-Undang tentang Desa maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan diturunkan ke desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud yaitu pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. Terkait dengan penggunaan dana desa ke arah pembangunan fisik, apakah anggaran pembangunan fisik dapat menjawab kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan atau besarnya anggaran yang didapat untuk pembangunan fisik hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan para pemegang kekuasaan di desa.

Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan posisi anggaran desa dan realisasi belanja desa cisimeut tahun anggaran 2021:

Gambar 1. 2

Diagram Anggaran Belanja Desa Cisimeut Tahun 2021



Sumber: Laporan Keuangan Desa Cisimeut

Dapat dilihat dari diagram tersebut, realisasi belanja desa yang dilakukan oleh pemerintah desa cisimeut lebih rendah dari capaian yang ditargetkan. Pada belanja untuk penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa tidak terdapat realisasi karena tidak terjadinya bencana dan hal darurat serta mendesak yang terjadi di desa cisimeut pada tahun 2021.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan uraian dari laporan realisasi anggaran belanja desa cisimeut tahun 2021:

Tabel 1. 3

Laporan Realisai dan Rencana Anggaran Belanja Desa Cisimeut Tahun Anggaran 2021

Ketrerangan	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	442.516.939	435.905.594
Pelaksanaan Pembangunan Desa	765.077.000	745.241.000
Pembinaan Kemasyarakatan	45.604.700	42.232.000
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	381.600.000	381.600.000
<b>TOTAL ANGGARAN BELANJA DESA</b>	<b>1.634.798.639</b>	<b>1.604.978.594</b>

Sumber: Laporan Keuangan Desa Cisimeut

Dapat dilihat dari Tabel 1.3 diatas, pada realisasi penyelenggaraan pemerintah daerah di Desa Cisimeut hanya sebesar Rp 435.905.594 dari target yang ditetapkan yaitu Rp 442.516.939. Pada angka realisasi belanja desa untuk pelaksanaan

pembangunan desa terbilang cukup rendah dari angka yang dianggarkannya. Kemudian pembinaan kemasyarakatan tidak mencapai target yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 45.604.700. Sedangkan untuk realisasi belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Rp 381.600.000.

Menurut penelitian Partini H (2018) yang berjudul Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar menyatakan bahwa pengelolaan dana desa tersebut sudah efektif.

Maka berdasarkan pemikiran diatas penulis tertarik untuk meneliti sejauhmana efektivitas pengelolaan dana desa untuk kepentingan pembangunan fisik. Desa Cisimeut merupakan salahsatu desa yang berada di kecamatan Leuwidamar kabupaten Lebak yang dipilih penulis sebagai lokasi penelitian dengan judul **“Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Cisimeut Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak”**.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

1. Penyerapan belanja pembangunan desa cisimeut, khususnya pembangunan fisik desa yang belum maksimal.
2. Angka realisasi anggaran belanja pembangunan desa jauh di bawah target anggaran yang ditetapkan.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Oleh karena itu dapat di identifikasikan permasalahan sebagai berikut :

Apakah pengelolaan dana desa telah dilaksanakan secara efektif dalam meningkatkan pembangunan fisik desa cisimeut kecamatan leuwidamar kabupaten lebak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Adapun maksud dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dan diharapkan hasil akhir dari penelitian ini dapat memberikan pengaruh signifikan kepada pemerintah desa dalam mengelola sistem penganggaran dan kinerja yang berorientasi pada visi misi organisasi.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa cisimeut kecamatan leuwidamar kabupaten lebak.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu :

### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, memberikan bahan kajian bagi pembaca, khususnya rekan-rekan mahasiswa yang terkait pada bidang ini dan akan melakukan penelitian sejenis dimasa akan datang.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian dapat meningkatkan pengetahuan penulis terhadap anggaran dana desa dan kinerja para pelaksana pembangunan fisik desa.

#### **2. Bagi Universitas Pakuan**

Bagi universitas pakuan sebagai bahan tambahan referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa pada waktu yang akan datang, dan sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan pengetahuan bagi para pembaca.

#### **3. Bagi Desa**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan saran dan masukan untuk pembangunan fisik desa, dan dijadikan bahan pertimbangan mengenai faktor anggaran dana terhadap pembangunan fisik dan kinerja pemerintah desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi Sektor Publik**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Sujarweni (2015) Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu entitas atau organisasi publik yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departement-departement dibawahnya.

Menurut Mardiasmo (2018) Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Secara kelembagaan, dimain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.

Menurut Jamaluddin Majid (2019) menyatakan Akuntansi Sektor Publik dapat didefinisikan sebagai teknik mekanisme dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departement-departement di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan mekanisme dan perlakuan akuntansi pada organisasi publik yang terdiri atas proses pencatatan, pengidentifikasian, pengklasifikasian, pengukuran, pelaporan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya menjadi sebuah informasi keuangan bagi pihak-pihak terkait untuk pengambilan keputusan.

Menurut Jamaluddin Majid (2019) menyebutkan macam-macam organisasi sektor publik sebagai berikut:

- 1) Pemerintah pusat atau daerah
- 2) Yayasan sosial seperti Supersemar, Yatim Piatu, dan lain-lain
- 3) Yayasan dana seperti Undiamal SCTV, RCTI Peduli, Dompot Dhu'afa, dan lain-lain
- 4) Lembaga advokasi
- 5) Balai keselamatan

- 6) Yayasan kanker Indonesia
- 7) PMI

### **2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik**

Tujuan akuntansi pada sektor publik oleh American Accounting Association (AAA) dalam Sujarweni (2015), yaitu :

- a) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (manajemen control).
- b) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

### **2.1.3 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi Sektor Publik berkembang pesat karena mulai mendapat perhatian dari lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan mili negara/daerah, dan berbagai organisasi lainnya. Tuntutan yang besar dari masyarakat (publik) untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Pemerintah sudah mulai memeperhatikan kelayakan praktik manajemenpemerintah sehingga membutuhkan perbaikan dalam berbagai bidang terutama sistem akuntansi sebagai implikasi finansial dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkanpemerintah. Akuntans sektor publik berkaitan dengan penerapan domain publik yang memiliki wilayah yang lebih luas daripada sektor swasta.

Ruang lingkup publik yang luas sehingga perlu dibahas lebih lanjut tentang ruang lingkup akuntansi sektor publik. Domain atau ruang lingkup publik meliputi badan-badan pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit kerja pemerintah). Lembaga sektor publik meliputi perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya, dari segi lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan historis sehingga bersifat heterogen.

### **2.1.4 Peran Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi dibutuhkan pada setiap jenis organisasi baik sektor bisnis, sektor publik, maupun sektor sosial. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik antara lain :

- a) Pengelolaan keuangan negara
- b) Pelaporan Keuangan

- c) Pemeriksaan
- d) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik

Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan. Selain itu, kualitas laporan keuangan juga dapat dilihat dari hasil opini auditor. Jika Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor independen memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka hal itu menandakan laporan keuangan disajikan sangat baik. Jika auditor memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), maka hal mengindikasikan laporan keuangan disajikan cukup baik. Jika auditor memberi opini Tidak Wajar (TW), maka hal itu menunjukkan laporan keuangan buruk. Jika auditor tidak memberi pendapat (disclaimer opinion), maka hal itu menunjukkan laporan keuangan sangat buruk.

### **2.1.5 Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintah/lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang utuh.

Pemerintah sebagai entitas yang menjalankan akuntansi publik memiliki tujuan menjalankan pemerintahan dengan baik dan supaya tujuan negaranya menjadi terwujud. Tujuan akuntansi pemerintahan memang bukan mutlak mencari laba, namun bukan berarti diharamkan mencari laba. Atas nama terselenggaranya kehidupan bernegara lebih baik, laba dapat juga diambil, tentu dengan mementingkan pelayanan kepada masyarakat terlebih dahulu.

### **2.1.6 Standar Akuntansi Pemerintahan**

Pada tahun 2010 terbit PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP 24 tahun 2005. Diharapkan setelah PP ini terbit maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah. Ada yang berbeda antara PP 71 tahun 2010 ini dengan PP-PP lain. Dalam PP 71 tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran (IKPI 2009).

Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014. Lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri). Sedangkan Lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Kasa Menuju Akrua yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis

Aktual. Dengan kata lain, Lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP 24 Tahun 2005 tanpa perubahan sedikitpun.

## **2.2 Transfer Daerah dan Dana Desa**

Menurut Pemandagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1 ayat 1), Desa adalah alat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pemandagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Pemandagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 menyebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, dan hak asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa “pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang melaksanakan oleh pemerintahan desa BPD”. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan struktur organisasi desa yang terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud adalah sekretariat desa, pelaksana, kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka meendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Transfer Daerah dan Dana Desa terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta Dana Desa. Setiap tahun Pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan dan penetapan besaran alokasi Transfer Daerah dan Dana Daerah per Daerah.

### **2.2.1 Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa adalah Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban Dana Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan yang dimaksud yaitu pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk membantu dan menjalankan program-program kerja Pemerintah Desa yang telah direncanakan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 menyatakan pengelolaan dana desa meliputi:

- 1) Penganggaran
- 2) Pengalokasian
- 3) Penyaluran
- 4) Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan
- 5) Pedoman penggunaan
- 6) Pemantauan serta evaluasi

Peraturan Pemerintah No. 60 mengenai Dana adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa dan Desa Adat yang diteransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serah pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Hal tersebut seharusnya dapat mendorong seluruh pihak untuk membantu aparatur desa didalam pengelolaan dananya ataupun sekurang-kurangnya dalam hal pengawasan.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 dalam Yuliansyah dan Rusmianto (2016:32-33) menambahkan bahwa pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Untuk membiayai kewenangan untuk yang menjadi tanggungjawab desa. Namun untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antara lain : pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastuktur.dalam rangka pengetasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa terpacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Pengelolaan Dana Desa adalah Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban Dana Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

### **2.2.2 Pendapatan Desa**

Permendagri No.113 Pasal 8 ayat (1) Tahun 2014 menyatakan bahwa pendapatan desa merupakan segala penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapaatan desa terdiri dari: Pendapatan Asli Desa (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain.

#### **1. Pendapatan Asli Desa (PAD)**

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di desa. Pendapatan asli desa terdiri dari:

- a. Hasil Usaha
- b. Hasil Aset

- c. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa

## 2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. Pendapatan transfer terdiri dari:

### a. Dana Desa

Berdasarkan Permendagri No.114 Pasal 1 bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten maupun kota serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia,serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

### b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 menyebut pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi terhadap desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.

### c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan PP No.43 Tahun 2014 merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). PP No.43 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk setiap tahun anggaran. ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah setelah setelah dikurangi DAK.

### d. Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten kepada desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan umum.

Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dimaksud disalurkan melalui kas desa. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah, Indra Bastian (2015:368).

### 3. Pendapatan Lain-lain

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pendapatan lain-lain terdiri dari:

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat
- b. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Hibah dan Sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. Sedangkan lain-lain pendapatan desa yang sah dimaksud dengan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

#### 2.2.3 Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sementara tujuan alokasi dana desa adalah :

1. Mengatasi kesmiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tujuan Dana Desa menurut (<https://dosenppkn.com>) adalah :

1. Menciptakan ketentraman penduduk desa
2. Meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di desa

Sementara itu menurut UU No.6 tahun 2014 menyebutkan tujuan dana desa adalah memberikan service kepada penduduk umum di desa-desa, mengangkat kemiskinan, meningkatkan ekonomi desa, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa, menguatkan penduduk desa sebagai subyek pembaharuan. Pengalokasian anggaran di desa dilakukan oleh seorang yang memiliki wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan infrastuktur agar sebanding dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah pesat.

### 2.2.4 Manfaat Dana Desa

Adapun manfaat dari adanya anggaran desa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan.
2. Adanya anggaran dana desa akan mempercepat penyaluran atau akses di desa-desa, mengatasi permasalahan yang pelan-pelan dapat diselesaikan khususnya dalam hal pembangunan prasarana umum karena pendistribusian anggaran dilaksanakan secara adil dan merata.
3. Memajukan SDM yang ada di desa.
4. Semakin besarnya anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya, menuntut SDM yang ada di desa untuk lebih berkualitas dalam mengelola dana tersebut. Oleh karena itu selain dana tersebut digunakan bagi pembangunan desa seperti infrastruktur serta sarana dan prasarana, akan tetapi juga digunakan untuk pembangunan SDM yang berkualitas. (<https://dosenppkn.com>).

### 2.2.5 Konsep Dana Desa

Terbitnya undang-undang tentang pemerintah desa pada tahun 2014 tentu memberikan dampak yang cukup positif. Hal ini dikabarkan kepada masyarakat mengenai dana desa yang begitu besar pertahunnya. Tentu kesempatan itu diharapkan dapat mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun konsep dari dana desa adalah sebagai berikut :

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan dana tersebut ditransfer lewat anggaran dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota yang selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Dana desa juga merupakan dana pembangunan yang didesentralisasikan bagi desa sebagai proporsi tertentu dari APBD dan APBN yang ditunjukkan untuk pemerataan desa.
2. Definisi lain mengenai dana desa dimaknai sebagai pengelolaan keuangan harus berdasarkan keterbukaan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, pelaporan berdasarkan pengeluaran dan pencatatan, tanggungjawab berdasarkan hasil laporan.

### 2.2.6 Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Halim & Kusufi (2017:15) Akuntansi sektor publik mencakup proses manajerial dan pertanggungjawaban. Proses manajerial mencakup proses perencanaan, penganggaran, dan ratifikasi anggaran yang mencakup penentuan pos-pos kegiatan (aktivitas) beserta anggaran dananya, Akuntansi sektor publik sering disebut sebagai akuntansi dana untuk publik. Sedangkan pertanggungjawaban mencakup semua laporan mengenai realisasi anggaran dan kegiatan. Dalam akuntansi sektor publik, anggaran merupakan focal point sebagai landasan operasional

organisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan (operasional), Organisasi sektor publik harus patuh terhadap anggaran yang telah disahkan.

#### 1. Akuntansi Desa

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

#### 2. Pengelolaan Keuangan Desa

##### 1) Perencanaan

Pengertian perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya.

##### 2) Pelaksanaan

Menurut Sujarweni (2015:19) Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

##### 3) Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Bendahara desa akan bertugas sebagai pengelola dan penanggung jawab dalam proses penatausahaan keuangan desa yang dimandatkan kepadanya.

##### 4) Pelaporan

Pelaporan adalah penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Terkait dengan pelaporan, Dana desa yang telah direalisasikan harus dilaporkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yang kepada pemeriksa hasil pekerjaan terkait hasil pekerjaannya.

##### 5) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa adalah suatu keharusan bagi desa untuk memberikan jawaban dan melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

##### 6) Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan merupakan aktivitas yang berlawanan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Pembinaan dan pengawasann dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka membina, mengawasi, menilai dan memeriksa hasil pekerjaan dari pemerintah desa.

##### 7) Laporan Keuangan Desa

Laporan Keuangan desa merupakan hasil pekerjaan yang telah di dokumentasikan menjadi sebuah bentuk buku ataupun sejenisnya yang

digunakan sebagai pegangan dalam rangka pertanggungjawaban yang sah oleh pemerintah desa.

Laporan keuangan desa yang disajikan Menurut Sujarweni (2015:24) adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD)
2. Buku Kas Umum
3. Buku Kas Harian
4. Buku Bank
5. Buku Pajak
6. Buku Investasi Desa
7. Buku Persediaan
8. Buku Modal
9. Buku Piutang
10. Buku Hutang atau Kewajiban
11. Neraca
12. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

### **2.2.7 Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 Tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### **1. Transparan**

Menurut Nardiawan dalam Sujarweni (2015:28) Transparan dalam pengelolaan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perutusan perundang-undangan.

#### **2. Akuntabel**

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Sebani dan Ghozali dalam Sujarweni (2015:28) menyatakan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.

Selanjutnya Mardiasmo dalam Sujarweni (2015:28) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, mewajibkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi pihak pemberi amanat yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

### 3. Partisipatif

Adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dan pengawasan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung.

#### 2.2.8 Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung dipedesaan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (I Nyoman Shuida, 2016).

Pengertian Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serata berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

Pembangunan merupakan realisasi dari suatu perencanaan. Pembangunan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik yaitu “Pembangunan sekolah, prasarana kesehatan, pasar, jalan desa, jembatan, balai desa, dan sebagainya”. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan infrastruktur tersebut guna menunjang roda kehidupan sehari-hari yang berjalan lebih baik dan menjadikan masyarakat lebih sejahtera dengan adanya pembangunan fisik.

#### 2.2.9 Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Aspek

pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata suatu tuntutan kebutuhan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial serta budaya masyarakatnya. Pembangunan Fisik ini menjadi salah satu faktor yang dapat membantu dan mensejahterakan masyarakat di Desa.

Pelaksanaan pembangunan fisik ditunjukkan dengan adanya proyek-proyek pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana fisik. Sehubungan dengan hal tersebut, Sujarto (1985) mengemukakan beberapa contoh proyek pembangunan fisik yang merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi non fisik, yaitu:

1. Proyek pembangunan fisik bidang sosial
2. Pembangunan sosial budaya
3. Proyek fisik sosial ekonomi

Menurut B.S Muljana (2001) pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolahan, rumah sakit, gedung, pasar, serta penerangan jalan, dan irigasi air.

#### **2.2.10 Kebijakan Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat daerah dan yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 ini membahas tentang bagaimana penganggaran, pengalokasian dana desa setiap Kabupaten/Kota, pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pelaporan dana desa, pemantauan dan evaluasi dana desa, dan ketentuan peralihan dana desa.

Perencanaan pada dasarnya yaitu suatu proses untuk penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses perencanaan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fisik, kepala Desa selaku pimpinan pemerintah Desa harus dapat membina hubungan yang baik dengan perangkat maupun lembaga-lembaga Desa yang ada dalam proses perencanaan agar pembangunan Desa dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang sesuai keinginan. Setelah pemerintah Desa mendapatkan bantuan Dana Desa baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota pemerintah akan menindaklanjuti dengan menggunakan Dana Desa untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan perangkat desa dituntut wajib membuat/menyajikan laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan Dana Desa yang sudah diterima oleh Desa.

## 2.3 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

### 2.3.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

#### Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Nova Sulastri 2016  Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna	Independent : Pengelolaan Alokasi Dana Desa  Dependen : Pembangunan Fisik Desa	Metode penelitian analisis deskriptif	Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dilihat dari:  Tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan waktu pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangatrendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat.
2	Sonia Apriani 2021  Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul Dyi	Tata Kelola Dana Desa	Metode penelitian deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses perencanaan Dana Desa untuk BLT-Desa dilaksanakan melalui musyawarah desa khusus.</li> <li>• Dalam pelaksanaannya terdapat 17 kriteria miskin yang digunakan oleh Pemerintah Desa Sumbermulyo.</li> <li>• Dalam melakukan penatausahaan Dana Desa untuk BLT-Desa Pemdes Sumbermulyo</li> </ul>

				<p>menggunakan Sistem Keuangan Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Pemdes Sumbermulyo menyusun LPJ yang berisi tentang pelaksanaan BLT-Desa di Desa Sumbermulyo.</li> </ul>
3	<p>Abu Masihad</p> <p>2018</p> <p>Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017.</p>	<p>Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa</p>	<p>Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif</p>	<p>Pengelolaan keuangan desa dalam hal ini Alokasi Dana Desa (ADD) desa Marga Ayu terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam tahap perencanaan, secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan, namun secara target waktu tidak sesuai dengan peraturan.</li> <li>• Dalam tahap pelaksanaan, secara prosedur sudah sesuai peraturan meskipun terjadi keterlambatan pencairan dana. Dalam tahap penatusahaan dapat dikatakan sudah sesuai aturan.</li> </ul>
4	<p>Icha Shintia Dewi</p> <p>2019</p> <p>Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Independen : Pengelolaan Dana Desa</p> <p>Dependen : Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif</p>	<p>Metode penelitian deskriptif kualitatif</p>	<p>Pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sudah dilakukan dengan baik yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat.</p>

	Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018).	Ekonomi Islam		
5	Ali Ulumudin  2018  Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016.	Independen: Pengelolaan Dana Desa	Metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif	Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016 bahwa program dari anggaran dana desa pada tahun 2016 di Desa Puser lebih kepada pembangunan infrastruktur, anggaran dana desa pada tahun 2016 belum transparan kepada masyarakat secara peruntukan maupun rincian jelasnya.
6	Partinih H  2018  Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Bolongbangken g Utara Kabupaten Takalar	Independen: Pengelolaan Dana Desa  Dependen: Pembangunan Fisik Desa	Metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Berdasarkan hasil perhitungan dan pengumpulan data terkait pengelolaan Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Balangtanaya dapat diketahui bahwa semua kegiatan pembangunan fisik pada tahun 2017 mencapai angka 100% yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya sudah berjalan dengan baik dan berada dalam kategori efektif.
7	Ivoaroto Immanuel dan Sebua	Independen : Pengelolaan Dana Desa	Metode penelitian deskriptif dengan	Efektivitas dana desa yang dilaksanakannya Musrebang desa oleh pemerintah desa. Pelaksanaan Musrenbagdesa

	Zamili  2018  Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Desa Limo Biang Kecamatan Pulau Batu Utara Kabupaten Nias Selatan).	Dependen : Pemberdaya an Masyarakat Desa	pendekatan kualitatif	telah dilaksanakan,namun Penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak efektif sebab lebih didominasi oleh perangkat desa dan banyak usulan kegiatan untuk meningkatkan keberadaan masyarakat yang diusulkan oleh masyarakat tidak di indahkan dan tidak difasilitasi masyarakat desa
8	Lana Nurlailah  2019  Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Di Kecamatan Indralaya dan Kecamatan Payaraman Kabupaten Organ Ilir	Independen: Pengelolaan Dana Desa	Metode penelitian Deskriptif	Hasil penelitian menemukan bahwa penggunaan anggaran dana desa sudah efektif, proses penyusunan serta penetapan rencana pengelolaan anggaran dana desa telah mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir No. 19 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan penggunaan Aanggaran Dana Desa.
9	Andidni Winarianti  2020  Efektifitas Alokasi Dana Desa Dalam	Independen: Alokasi Dana Desa	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian Efektifitas Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto, dalam proses pengelolaanya terdiri dari tiga tahapan yakni perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto sudah dikatakan efektif dimana dalam kegiatan musrembang Desa tingkat partisipasi masyarakat dan

	Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kabupaten Gowa			tingkat penyampaian pendapat telah meningkat, pelaksanaannya masih kurang efektif karena belum adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto masih dikatakan belum efektif karena masyarakat tidak dilibatkan dalam evaluasi terkait pembangunan yang dilakukan di Desa
--	--	--	--	--

Tabel 2. 2

## Matriks Penelitian Terdahulu

Keterangan	Pembangunan Fisik	
	Efektif	Tidak Efektif
Pengelolaan Dana Desa	Icha Shintia Dewi (2019) Partini H (2018) Lana Nurlailah (2019)	Nova Sulastri (2016) Ivoaroto Immanuel dan Sebua Zamili (2018)

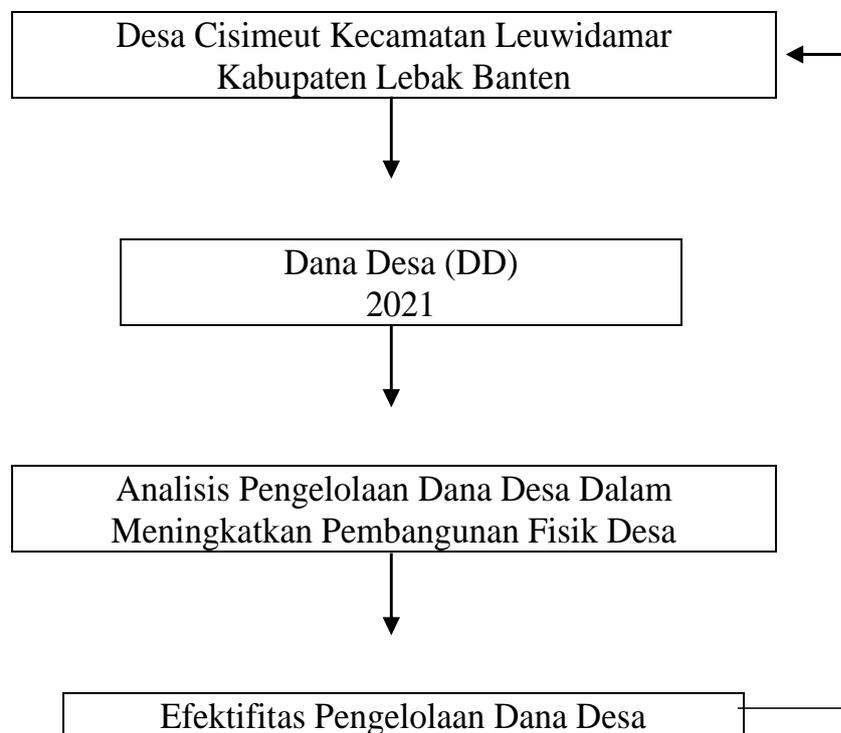
### 2.3.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan merupakan tulang punggung seluruh tubuh penelitian. Kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran dari peneliti (argumentasi peneliti) yang dilandasi dengan konsep-konsep dan teori yang relevan guna memecahkan masalah peneliti.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya memuat strategi pembangunan desa menggunakan Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya di kategorikan sebagai Dana Desa (DD) pada Desa Cisimeut di alokasikan untuk pembangunan fisik desa guna meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dalam pengalokasian dana desa tersebut di butuhkan proses pengelolaan yang baik oleh pemerintah desa diantaranya, dengan melakukan pencatatan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tercipta keefektifan pengelolaan dana desa yang nantinya akan memberikan gambaran tentang berhasil tidaknya suatu desa mengelola keuangannya.



Gambar 2.1

Konstelasi Penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) Penelitian Kuantitatif adalah metode positivistik yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Sedangkan menurut Hardani, dkk (2020) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitik beratkan kegiatan ilmiah dengan cara penguraian dan pemahaman terhadap gejala-gejala sosial yang diawasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan fisik desa Cisimeut, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak.

#### **3.2 Objek Unit Analisis dan Lokasi Penelitian**

Objek dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan dana desa tersebut akan digambarkan melalui tingkat efektivitas pelaksanaan dari Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Cisimeut.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah desa Cisimeut yang sumber datanya berasal dari laporan keuangan desa Cisimeut tahun 2021. Lokasi penelitian yaitu, Kantor Balai Desa Cisimeut yang bertempat di Kp.Cepak Kandang RT/RW 03/01 Desa Cisimeut Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Penelitian**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Menurut Hardani (2020) data kuantitatif menunjukkan sebuah kuantitas berupa angka absolute sehingga dapat ditentukan magnitudenya (Besarannya), metode pengumpulannya bergantung pada sampel yang diambil dan pengumpulan data yang terstruktur, sehingga data yang dihasilkan dapat dibandingkan dan digeneralisasi. Data kuantitatif berkaitan erat dengan pengujian hipotesis berdasarkan teori dan fenomena yang terjadi. Sedangkan penelitian kualitatif berfokus pada temuan, apabila dalam melakukan penelitian ditemukan sesuatu hal yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka itulah yang harus dijadikan perhatian dalam penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Menurut Hardani, dkk (2020) data primer adalah data dalam suatu penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angka, observasi, wawancara, dan lain-lain. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara terhadap informan. Informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan dalam penelitian ini memiliki pengetahuan yang baik tentang pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Cisimeut. Informan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Bendahara Desa
- 4) KAUR Pembangunan

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data untuk penelitian yang diperoleh secara tidak langsung seperti berasal dari buku, jurnal, publikasi, data yang berasal dari instansi pemerintah, data yang berasal dari perusahaan swasta, dan lain-lain. Data sekunder yang akan dianalisis dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan Desa Cisimeut.

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2018:38), operasionalisasi variabel adalah atribut dan nilai dari suatu kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan. Operasional yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Dana Desa dalam Pembangunan Fisik Desa.

Tabel 3. 1

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
Dana Desa	Dana Desa yang berada di Laporan Realisasi Anggaran Desa Cisimeut	$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Dana Desa}}{\text{Target Anggaran Dana Desa}} \times 100$	Rasio

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode mengumpulkan dan mengukur informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan yang relevan dan mengevaluasi hasilnya.

#### 1) Wawancara

Menurut Hardani, dkk (2020) wawancara merupakan situasi sosial antara dua orang, dimana proses psikologis yang terlibat mengharuskan kedua individu tersebut memberikan timbal balik berupa tanggapan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan informasi secara langsung dengan informan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Maka dari itu, peneliti berharap dengan menggunakan metode wawancara peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih terperinci dan gambaran jelas mengenai pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Cisimeut.

#### 2) Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumen yang digunakan dan akan dianalisis dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran desa.

### 3.6 Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Menurut Hardani, dkk (2020) metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan pencatatan dan analisis data hasil penelitian secara sistematis menggunakan perhitungan rasio efektivitas yaitu membandingkan antara realisasi anggaran dengan target anggaran. Menurut Sudaryono dkk (2017) menjelaskan rasio efektivitas adalah suatu rumus yang digunakan untuk mengukur kekuatan sebuah daerah dalam mengaktualisasikan pendapatan yang ditargetkan berdasarkan potensi riil daerah yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan daerah tersebut. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka menggambarkan kemampuan desa yang semakin baik.

Rumus Rasio Efektivitas Dana Desa

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Anggaran Dana Desa}{Target Anggaran Dana Desa} \times 100\%$$

Berikut ini adalah indikator penilaian efektivitas menurut Mahmudi (2010) sebagai berikut:

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Cisimeut berdiri pada Tahun 1946 dengan Kepala Desa yang pertama bernama Bapak Jaro Karis. Desa Cisimeut yang secara struktural merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari sistem perwilayahan Kecamatan Leuwidamar. Secara geografis Desa Cisimeut terletak pada posisi Topografi, ketinggian Desa ini adalah berbukit dan bergelombang dengan ketinggian 200 M DPL di atas permukaan air laut. Berdasarkan BPS Kabupaten Lebak Tahun 2004, selama Tahun 2004 curah hujan di Desa Cisimeut rata-rata mencapai 2000-3000 M/Detik. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan November dan Desember hingga mencapai 405.04 MM yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2010-2014. Secara administratif, Desa Cisimeut terletak di wilayah Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak dengan posisi dibatasi oleh wilayah Desa-desa tetangga. Desa Cisimeut memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah 1300,40 Ha yang terbagi menjadi 7 Rw dan 30 Rt. Batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Desa Jalupang Mulya
- Timur : Desa Tanjung Wangi – Kecamatan Muncang
- Selatan : Desa Cisimeut Raya – Nayagati
- Barat : Desa Margawangi

Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jalupang Mulya, di sebelah Barat berdasarkan dengan Desa Margawangi, di sisi Selatan berdasarkan dengan Desa Cisimeut Raya-Nayagati Kecamatan Leuwidamar sedangkan di sisi Timur berbatasan dengan Desa Kanjung Wangi Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak. Jarak tempuh Desa Cisimeut ke Ibu Kota Kecamatan adalah 16 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 38 KM, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 90 menit.

Luas wilayah Desa Cisimeut 1300,40 ha. Luas lahan yang ada terbagi kedalam beberapa kelompok seperti pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Luas lahan yang digunakan untuk pemukiman 465 ha, luas lahan untuk pertanian 222 ha yang terdiri atas Sawah irigasi teknis 97 ha dan 28 Sawah tadah hujan, luas tanah tegalan 530 ha dan pemakaman umum 2,5 ha, sedangkan untuk kegiatan ekonomi, sekolahan dan lapangan serta jalan sekitar 250 ha. Wilayah desa Cisimeut secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah sawah yang sangat cocok dengan pertanian. Secara presentasi kesuburan tanah dapat dipetakan sebagai berikut: tanah sangat subur, tanah subur dan tanah sedang. Hal ini memungkinkan tanaman padi

untuk dapat panen dengan ton/ha. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di desa Cisimeut. Dengan kondisi alam yang demikian telah menghantarkan sektor pertanian secara umum mampu menjadi penyumbang Produk Domestik Desa Bruto (PDDDB) terbesar desa . Karena posisi desa Cisimeut terletak diantara tiga Desa maka banyak lahan pertanian yang sudah beralih fungsi yang secara umum akan berdampak pada sektor pertanian.

#### 4.1.1 Keadaan Sosial dan Ekonomi

##### 4.1.1.1 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2016, jumlah penduduk Desa Cisimeut adalah 5.515 jiwa, dengan rincian Laki-laki 2.839 dan perempuan 2.676. jumlah penduduk tersebut tergabung dalam 1.439 Kartu Keluarga (KK).

Tabel 4. 1

Jumlah Penduduk Desa Cisimeut

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2.839	2.676	5.515

Sumber : Profil Desa Cisimeut

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 165 jiwa dibandingkan jumlah penduduk perempuan di Desa Cisimeut Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak.

##### 4.1.1.2 Mata Pencaharian

Tabel 4. 2

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Cisimeut

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Satuan
1	Buruh Tani	1.105	Jiwa
2	Petani	1.157	Jiwa
3	Pedagang	18	Jiwa
4	Tukang Kayu	87	Jiwa
5	Tukang Batu	15	Jiwa
6	Penjahit	8	Jiwa
7	PNS	17	Jiwa

8	Sopir	37	Jiwa
9	Montir/Mekanik	3	Jiwa
10	Guru Swasta	25	Jiwa

Sumber : Profil Desa Cisimeut

Pada Tabel 4.2 diatas bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Cisimeut terlihat jelas bahwa masyarakat Desa Cisimeut ini lebih dominan bekerja sebagai petani, dikarenakan Desa Cisimeut ini sebagai besar wilayah area pertanian dan persawahan.

#### 4.1.2 Sarana dan Prasarana Desa Cisimeut

Sebagai dasar yang berkembang di Desa Cisimeut terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3

#### Sarana dan Prasarana Desa Cisimeut

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Kantor Desa	1	Unit
2	TPU	3	Unit
3	Poskamling	33	Unit
4	Masjid	9	Unit
5	Mushola	12	Unit
6	Puskesmas Pembantu (PUSTU)	1	Unit
7	Posyandu	7	Unit
8	Paud	2	Unit
9	SD	2	Unit
10	SMP	1	Unit
11	SMA	1	Unit
12	Jalan Aspal Penetrasi	1.200	M <sup>2</sup>
13	Jalan Sirtu/Koral	2.900	M <sup>2</sup>
14	Jalan Rabat Beton	150	M <sup>2</sup>
15	Jalan Tanah	1.100	M <sup>2</sup>

Sumber: Profil Desa Cisimeut

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas bahwa Desa Cisimeut dengan penduduk mayoritas Islam, oleh karena itu disediakan tempat beribadah hanya untuk umat Islam saja. Berdasarkan tabel di atas terdapat 9 unit masjid dan 12 unit mushola di Desa Cisimeut.

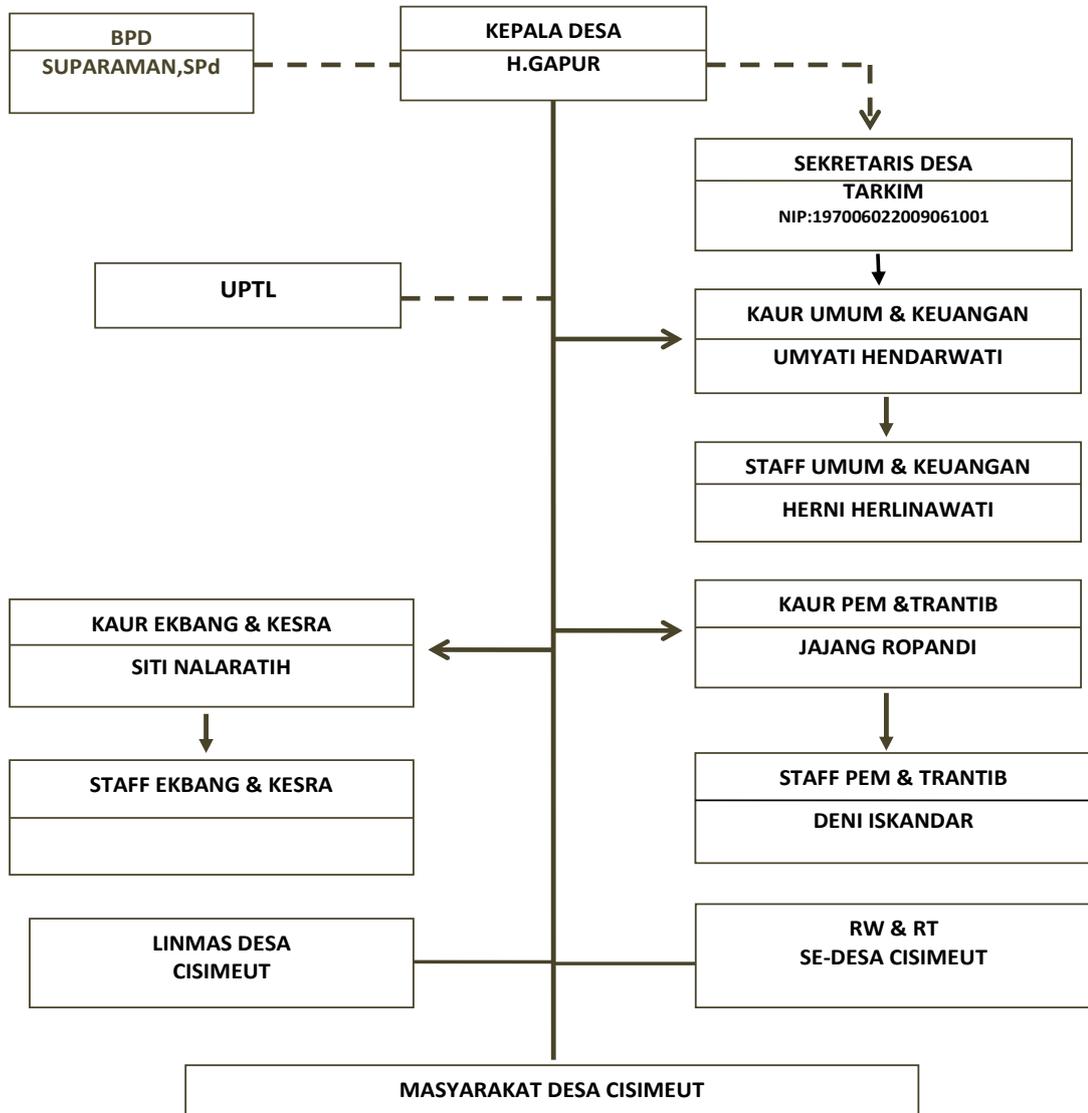
Kondisi sosial budaya masyarakat Desa Cisimeut semakin maju hal ini ditunjukkan jumlah kemiskinan semakin mengecil, meskipun tujuh dusun yang berada di bawah wilayah Desa Cisimeut ada perbedaan situasi dan kondisi perekonomian. Wilayah dusun yang padat penduduknya, baik penduduk yang tinggal menetap maupun penduduk pendatang dari luar sehingga banyak rumah tinggal dirubah menjadi usaha pertokoan, warung, dan jasa rental fotocopy dan lain-lain. Dengan model keterbukaan dan kerja sama yang baik antara lembaga-lembaga Desa serta peran aktif BPD dalam merencanakan, mengendalikan, memonitoring pelaksanaan pembangunan masyarakat Desa Cisimeut. Faktor yang menyebabkan masalah kemiskinan, ketenaga kerjaan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan Desa saat ini dapat di minimalisir.

#### **4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cisimeut**

Untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Cisimeut, maka Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa menjadi tugas dan tanggung jawab penuh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Struktur Organisasi Desa Cisimeut dilengkapi dengan tim pengawasan oleh BPD serta pelaksana perencanaan yaitu kaur pembangunan, sehingga peningkatan pembangunan fisik di Desa Cisimeut dapat mencapai target yang optimal. Adapun struktur organisasi Desa Cisimeut Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak sebagai berikut:



## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA CISIMEUT



Sumber: Struktur Organisasi Desa Cisimeut

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cisimeut

Berikut ini adalah penjelasan tugas dari masing-masing jabatan yang ada di Desa Cisimeut:

1) Kepala Desa

Kepala Desa Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan Rancangan PERDES.
- c. Menetapkan PERDES yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Membina kehidupan masyarakat dan perekonomian Desa.
- e. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa yang mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa. Dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa serta mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan.
- b. Pelaksanaan urusan keuangan.
- c. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

3) Kaur Umum dan Keuangan (Bendahara)

Bendahara mempunyai tugas pokok:

- a. Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa
- b. Pengelolaan administrasi keuangan Desa
- c. Mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa

4) Staf Umum dan Keuangan

Staf Umum dan Keuangan mempunyai tugas yaitu:

- a. Mengkoordinir dan memeriksa serta penyimpanan surat masuk dan surat keluar
- b. Mengkoordinir dan memeriksa barang-barang yang masuk dan keluar serta pendistribusiannya
- c. Mengkoordinir pembuatan laporan inventaris barang, kartu inventaris barang

5) Kaur Pembangunan

Kaur pembangunan mempunyai tugas pokok:

- a. Membantu Kepala Desa dalam menyiapkan pelaksanaan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi Desa
  - b. Pengelolaan administrasi pembangunan
  - c. Pengelolaan pelayanan masyarakat
  - d. Menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantu
- 6) Staf Pembangunan
- Staf Pembangunan mempunyai tugas pokok:
- a. Melaksanakan pengawasan pembangunan
  - b. Melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan, data informasi dan UU di bidang pembangunan
  - c. Pemberdayaan masyarakat Desa
  - d. Memfasilitasi kegiatan Alokasi Dana Desa
- 7) Kaur Ekbang
- Kaur Ekbang mempunyai tugas pokok:
- a. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi Desa
  - b. Pengelolaan administrasi pembangunan
  - c. Pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantu
- 8) Staf Ekbang
- Staf Ekbang mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, pokok dan pelaporan ekonomi dan pembangunan
  - b. Melakukan pengumpulan data pengusaha kecil dan menengah
- 9) BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun tugas dari BPD yaitu:
- a. Menyusun tata tertib BPD
  - b. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
  - c. Membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa
  - d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa

#### **4.2 Analisis Variabel**

Dana Desa yang dikelola Desa Cisimeut yaitu Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak. Adapun penggunaan Dana Desa di Desa Cisimeut Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak digunakan untuk

membiayai Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana Darurat serta Penyertaan Modal Desa. Penggunaan Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cisimeut tersebut sudah transparan dengan adanya musyawarah seperti musyawarah dusun, musyawarah Desa dan telah dipublikasikan oleh pemerintah Desa Cisimeut seperti terdapat baliho transparansi APBDDesa tahun 2019 di depan Kantor Desa Cisimeut yang dapat di akses oleh masyarakat Desa Cisimeut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Cisimeut diketahui jumlah Rencana Anggaran Dana Desa yang diterima pada Tahun 2021 sebesar Rp 1.634.798.639. Berikut Rincian Alokasi Rencana Anggaran Dana Desa:

Tabel 4. 4

Rencana Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Cisimeut Tahun Anggaran 2021

No.	Bidang	Anggaran
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	442.516.939,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	765.077.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	45.604.700,00
4	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	381.600.000,00
Total Rencana Anggaran Dana Desa		1.634.798.639,00

Sumber: Penggunaan Anggaran Dana Desa Cisimeut

Pada Tabel 4.4 di atas dapat di ketahui Rencana Anggaran Dana Desa pada Tahun 2021 sebesar Rp 1.634.798.639 dan di alokasikannya kepada empat bidang diantaranya bidang penyelenggaraan pemerintah desa dengan alokasi rencana anggaran sebesar Rp 442.516.939 untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan alokasi rencana anggaran sebesar Rp 765.077.000, bidang pembinaan kemasyarakatan dengan alokasi rencana anggaran sebesar Rp 45.604.700, dan yang terakhir bidang penanggulangan bencana darurat dengan alokasi rencana anggaran sebesar Rp 381.600.000. Diantara dari empat bidang tersebut, bidang pembangunan desa mendapat rencana anggaran dana desa yang lebih besar.

#### **4.2.1 Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa**

Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa di Desa Cisimeut Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak sangat penting untuk membiayai pengembangan daerah tertinggal. Pelaksanaan Dana Desa untuk program pembangunan fisik dan non fisik yang berkaitan dengan indikator tingkat pembangunan Desa. Pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa dimulai dari perencanaan sampai evaluasi hasil pembangunan fisik desa. Penggunaan dana desa ini digunakan untuk pembangunan desa yang

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan di Desa Cisimeut dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah desa adalah strategi pembangunan yang menjamin pembangunan yang adil, dan hasil pembangunan tersebut dinikmati oleh masyarakat. Pemerintah desa juga berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam kerangka pembangunan nasional untuk memastikan kesejahteraan masyarakat yang setara.

#### 1. Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan Desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Secara dokumentatif perencanaan pembangunan desa dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 tahun, kemudian dibuat kembali Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 tahun. RKPDesa ini merupakan dokumen penting untuk pembangunan desa selama 1 tahun dan dijadikan acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pada tahapan perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Cisimeut dimulai dari mengadakannya musyawarah dusun (MusDus) di tingkat Rt/Rw, kemudian dari musyawarah dusun (MusDus) dilakukan kembali musyawarah desa (MusDes). Setelah seluruh musyawarah untuk pembangunan selesai dilaksanakan tahapan selanjutnya yaitu kepala desa membentuk tim untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), kemudian setelah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) disusun, tim melaporkan hasil keputusan kepada pemerintah desa untuk dibahas kembali di musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang). Musrembang desa ini melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa, musrembang ini juga bertujuan untuk mengajak masyarakat partisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di Desa.

Hasil informasi yang diperoleh melalui wawancara menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Muasembang sudah baik dan banyak mendukung dalam pembangunan Desa. Pemerintah desa juga sudah cukup transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai proses perencanaan pembangunan Desa.

Adapun Usulan RKPDesa Tahun 2021 di Desa Cisimeut untuk Bidang Pembangunan Desa sebagai berikut:

Tabel 4. 5

## Usulan RKPDesa Pembangunan Desa Cisimeut Tahun 2021

No	Sub Bidang Pembangunan	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Biaya
1	Bidang Pendidikan	1) Pembangunan Ruang Kelas SDN 1 Cisimeut	Kp Sindangreret	1 Unit	Rp 125.000.000
		2) Pembangunan Fasilitas Parkir SDN 1 Cisimeut	Kp Sindangreret	100 Meter	Rp 50.000.000
		3) Bantuan Stimulan Sarpras PAUD	Desa Cisimeut	2 Ruang	Rp 20.000.000
2	Bidang Kesehatan	1) Pembangunan Sarana Posyandu	Tersebar	7 Unit	Rp 100.000.000
		2) Pemeliharaan Gedung Puskesmas	Desa Cisimeut	1 Paket	Rp 10.000.000
		3) Posyandu Mandiri	Desa Cisimeut	1 Paket	Rp 5.000.000
		4) Penyuluhan Kesehatan Gizi, KB dan Imunisasi	Desa Cisimeut	1 Paket	Rp 10.000.000
		5) Pembangunan Santinasi	Desa Cisimeut	1 Paket	Rp 10.000.000
		6) Jaminan Kesehatan Bumil	Desa Cisimeut	1 Paket	Rp 5.000.000
		7) Kesehatan Lingkungan	Desa Cisimeut	1 Paket	Rp 5.000.000
		8) Pencapaian SDGS dalam situasi dan	Desa Cisimeut	1 Paket	Rp 150.000.000

		kondisi Pandemi Covid-19			
		9) Penyelenggaraan Posyandu (Tambahkan makanan, lansia, bumil, obat gizi dan alat antropometer)	Desa Cisimeut	1 Paket	Rp 45.000.000
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1) Perkerasan Jalan	Tapos	1000 Meter	Rp 200.000.000
		2) Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok	Kp Kipar, Kp Sukarahmat, Kp Cikaka, dan Kp Cipeuyah Barat	500 Meter	Rp 318.750.000
		3) Rehabilitasi/Pembangunan Jaringan/Saluran Irigasi	Pasir Eurih	150 Meter	Rp 90.000.000
		4) TPT	Kp Babalan		Rp 69.000.000
		5) Pembangunan Lapen Jalan (Rehab)	Kp Sindangreret – Kp Bantarnaga	1250 Meter	Rp 150.000.000
4	Bidang Kawasan Pemukiman	1) Pembangunan Rumah Layak Tidak Huni	Tersebar	195 Unit	Rp 200.000.000
5	Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1) Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Cisimeut	1 Unit	Rp 23.650.000
6	Bidang Perhubungan	1) Pembuatan dan Pengelolaan	Desa Cisimeut	1 Paket	Rp 10.000.000

	Komunikasi dan Informatika	n Jaringan Informasi Desa			
<b>Jumlah</b>					<b>Rp 1.596.4000</b>

Sumber: Usulan RKPDesa Cisimeut Tahun 2021

Terkait Tabel 4.5 di atas terdapat usulan RKPDesa Tahun 2021 di bidang pembangunan Desa. Dari usulan RKPDesa tersebut terdapat 20 jenis kegiatan yang diusulkan dalam pembangunan Desa, namun karena ini hanya sebatas usulan perencanaan pembangunan Desa maka tidak semua usulan perencanaan tersebut dapat dilaksanakan hanya yang terpenting yang akan diprioritaskan. Dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) untuk usulan rencana pembangunan fisik Desa pada Tahun Anggaran 2021 terdapat 2 pembangunan yang terlaksana dimana pembangunan tersebut di danai dari Dana Desa (DD) yaitu pembangunan jalan lingkungan Paving Blok, dan pembangunan perkerasan jalan.

## 2. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa terdapat beberapa prinsip yang harus ditaati yaitu mencakup penerimaan dan pengeluaran desa yang melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dari Rekening Kas Desa harus di tandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

Pada tahapan pelaksanaan pembangunan desa, kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau masyarakat desa. Kepala desa memeriksa daftar pelaksanaan yang terdapat dalam RKPDesa yang di tetapkan dalam APBDesa dan menetapkan pelaksanaan kegiatan dengan keputusan kepala desa.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Cisimeut berpedoman pada Ringkasan APBDesa tahun 2021 yang terdiri 6 pembangunan desa, diketahui bahwa terdapat 2 pembangunan yang menggunakan Anggaran Dana Desa (DD) dan terdapat 4 bangunan yang menggunakan anggaran APBD.

Berikut daftar Pembangunan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa yang dialokasikan didalam Pembangunan Fisik Desa yang Terlaksana di Desa Cisimeut Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4. 6

### Pembangunan Fisik Desa yang Terlaksana di Desa Cisimeut Tahun 2021

1	Pembangunan Perkeasan jalan	Rp 150.000.000	DD
2	Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok	Rp 60.076.000	DD
3	Pembangunan Lapen	Rp 325.000.000	APBD

4	Pembangunan Santinasi Lingkungan	Rp 150.000.000	APBD Provinsi
5	Pembangunan Bedah Rumah	Rp 300.000.000	APBD Kabupaten
6	Pembangunan jalan lingkungan	Rp 189.240.000	APBD Provinsi

Sumber: APBDesa Pemerintah Desa Cisimeut Tahun 2021

Adapun Alokasi Anggaran Dana Desa untuk tiap-tiap kegiatan Pembangunan Fisik Desa Cisimeut sebagai berikut:

Tabel 4. 7

Alokasi Anggaran Dana Desa Pembangunan Perkerasan Jalan

Keterangan	Anggaran	Realisasi
Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
Upah Tenaga Kerja	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000
Bahan Baku/Material	Rp 83.475.000	Rp 83.475.000
Sewa Peralatan	Rp 17.925.000	Rp 17.925.000
<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp 150.000.000</b>	<b>Rp 150.000.000</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Desa Cisimeut

Tabel 4. 8

Alokasi Anggaran Dana Desa Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok

Keterangan	Anggaran	Realisasi
Belanja Modal – Administrasi Kegiatan	Rp 60.076.000	Rp 60.076.000
<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp 60.076.000</b>	<b>Rp 60.076.000</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Desa Cisimeut

3. Tahapan Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan

Tahap Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Cisimeut tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pengawasan dari pemerintah Desa. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak dari luar pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti : Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Kasi Ekbang yang diperlukan.

Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 68 yang menyatakan secara tegas hak masyarakat pembangunan serta melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pembangunan Desa oleh masyarakat Desa itu sendiri sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahap Perencanaan Pembangunan Desa dan tahap Pelaksanaan Pembangunan Desa. Pemantauan pada tahapan Perencanaan dilakukan dengan cara : menilai usulan RPJMDesa dan RKPDesa, kemudian pemantauan pada tahap Pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai, antara lain : pengadaan barang/jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa harus dilakukan secara cermat dalam setiap proses dan tahapan sesuai dengan rencana pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Dan masyarakat dapat melakukan pengawasan sebagai bentuk peran aktif untuk membantu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Cisemeut terhadap tahap pemantauan dan pelaksanaan telah menunjukkan hasil yang sangat baik terbukti dari banyaknya partisipan yang menghadiri tahap perencanaan di MusDus, MusDes, dan Musrembang, kemudian ditahap pelaksanaan masyarakat Desa telah mengemukakan pendapat dan menilai pelaksanaan pembangunan di Desa Cisemeut.

#### 4. Tahapan pelaporan Hasil Pembangunan Desa

Pelaporan hasil pembangunan di desa Cisemeut dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban. Jika pembangunan telah selesai dilakukan musyawarah serah terima dari desa ke BPD, untuk bagian keuangan pelaporannya dilakukan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes). Laporan tersebut dilakukan di kecamatan yang nantinya diserahkan ke kabupaten.

Tabel 4. 9

#### Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa Cisemeut Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Realisasi	Ket
1	Pembangunan Perkerasan Jalan	Rp 150.000.000	DD
2	Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok	Rp 60.076.000	DD

3	Pembangunan Lapen	Rp 325.000.000	APBD
4	Pembangunan Santinasi Lingkungan	Rp 150.000.000	APBD Provinsi
5	Pembangunan Bedah Rumah	Rp 300.000.000	APBD Kabupaten
6	Pembangunan jalan lingkungan	Rp 189.240.000	APBD Provinsi

### 4.3 Pembahasan Dan Interpretasi Hasil Penelitian

#### 4.3.1 Hasil Analisis Kualitatif

##### 1. Pembangunan Fisik Desa Cisimeut

Terdapat beberapa pembangunan fisik di Desa Cisimeut yang dianggarkan dan juga di realisasikan pada tahun 2021. Beberapa di antaranya berasal dari Dana Desa (DD), di antaranya lagi berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Berikut ini adalah pembanguana fisik yang dilakukan di Desa Cisimeut pada tahun 2021:

1. Pembangunan Perkerasan Jalan yang berlokasi di Tapos dengan volume pekerjaan 780 x 2,5 meter dan biaya yang di anggarkan sebesar Rp150.000.000. Anggaran yang dikeluarkan untuk Pembangunan Perkerasan Jalan di Tapos berasal dari Dana Desa (DD).
2. Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok yang berlokasi di Kp.Kipar – Kp.Cikakak dengan volume pekerjaan 337 x 100 meter dan biaya yang di anggarkan sebesar Rp 60.076.000. Anggaran yang dikeluarkan untuk Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok ini berasal dari Dana Desa (DD).
3. Pembangunan Lapen yang berlokasi di Kp.Cipeuyah – Kp.Moka dengan biaya yang di anggarkan untuk Pembangunan Lapen sebesar Rp 325.000.000 dan anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan Lapen berasal dari APBDDesa.
4. Pembangunan Santinasi Lingkungan secara tersebar dengan volume pekerjaan 15 KPM dan biaya yang di anggarkan sebesar Rp 150.000.000. Anggaran yang di keluarkan untuk pembangunan tersebut berasal dari APBD Provinsi.
5. Pembangunan Bedah Rumah yang secara tersebar dengan volume 20 KPM dan di anggarkan sebesar Rp 300.000.000. Anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan bedah rumah berasal dari APBD Kabupaten.
6. Pembangunan jalan lingkungan yang berlokasi di Kp.Bantarnaga dengan volume 450 meter dan yang di anggarkan untuk pembangunan tersebut sebesar Rp189.240.000. Anggaran yang dikeluarkan berasal dari APBD Provinsi.

Kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah Desa Cisimeut pada tahun 2021 dapat terealisasi dan berjalan dengan baik berkat koordinasi antara pemerintah Desa Cisimeut dan kelembagaan-kelembagaan yang ada di Desa Cisimeut terjalin dengan baik.

## 2. Tahapan-tahapan dalam Pembangunan Fisik di Desa Cisimeut

Dalam melakukan pembangunan fisik di Desa Cisimeut pemerintah Desa melakukan berbagai macam tahapan-tahapan sampai dengan proses evaluasi paska pembangunan. Tahapan pertama dimulai dari perencanaan, musyawarah tingkat rw yang mana nantinya hasil dari musyawarah tingkat rw tersebut di bawa ke musrembang Desa. Pada musrembang Desa ini bertujuan untuk mencari kesepakatan bersama untuk menentukan jenis pembangunan apa yang akan di lakukan dan lokasi pembangunannya dengan menggunakan dana yang ada. Hasil yang telah di sepakati dalam musrembang Desa selanjutnya dimasukan ke dalam RKPDesa sebagai prioritas yang akan di danai oleh APBDesa. Setelah itu baru dilakukan pembangunan fisik yang sudah di tetukan dalam tahapan sebelumnya. Kemudian setelah di lakukan pembangunan fisik di Desa Cisimeut pemerintah Desa Cisimeut melakikan evaluasi dengan mengadakan musyawarah Desa yang di hadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Desa, Pendamping, Kecamatan, dan masyarakat.

## 3. Faktor Penghambat dalam Pembangunan Fisik di Desa Cisimeut

Faktor yang menjadi penghambat pembangunan fisik di Desa Cisimeut adalah kurangnya alokasi anggaran yang di terima dan telatnya penyaluran anggaran dari pusat untuk maju ke tahapan selanjutnya, karena biasanya penyaluran dana dari pusat di berikan bertahap dengan besar 40%, 40% dan terakhir 20%. Namun masalah kurangnya alokasi anggaran di sebabkan dari pemerintah pusat, pemerintah Desa Cisimeut hanya melaksanakan pembangunan yang sudah di anggarkan dan mempertanggungjawabkan dengan uang yang ada. Untuk mengatasi pembangunan fisik Desa di tengah kurangnya anggaran, pemerintah Desa bersama-sama dengan masyarakat melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar mengatasi masalah yang ada terkait pembangunan.

## 4. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pembangunan Fisik Desa Cisimeut

Pihak-pihak yang di libatkan dalam setiap tahapan pembangunan fisik di Desa Cisimeut yaitu dari pihak kelembagaan Desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), TPK, Karangtaruna, Kepala Desa, Kasi Ekbang, Anggota Kegiatan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas untuk memonitori kegiatan pembangunan. Pihak lain di luar kelembagaan Desa yaitu Kecamatan setempat, pendamping Desa, pendamping lokal Desa, dan masyarakat khususnya tokoh masyarakat yang banyak berperan dalam proses perencanaan pembangunan dan material setempat yang sedia membantu dalam proses pembangunan.

### 4.3.2 Hasil Analisis Kuantitatif

Berdasarkan penelitian pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Cisimeut tahun 2021 diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi sehingga diperoleh data untuk menentukan perbandingan jumlah Anggaran Dana Desa dan Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Untuk menghitung tingkat Efektivitas pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan Rumus Rasio Efektivitas untuk mengetahui tingkat presentasi pencapaian kinerja Desa Cisimeut dalam pengelolaan Dana Desa.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Anggaran Dana Desa}{Target Anggaran Dana Desa} \times 100\%$$

Berikut hasil perhitungan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik Desa Cisimeut tahun 2021:

Tabel 4. 10

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Cisimeut Tahun 2021

NO	Pembangunan Fisik Desa	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektivitas	Ket
1	Pembangunan Perkerasan Jalan	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	100%	Efektif
2	Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok	Rp 60.076.000	Rp 60.076.000	100%	Efektif

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Cisimeut Tahun Anggaran 2021 dapat mencapai angka 100% untuk pembangunan fisik desa dalam Pembangunan Perkerasan Jalan dan Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok. Sesuai dengan indikator pengukuran dengan menggunakan rumus rasio efektivitas, bahwa dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan fisik Desa Cisimeut sudah dikelola secara efektif karena dapat dilihat dari hasil perhitungan diatas dapat mencapai angka 100%.

#### 1. Pembangunan Perkerasan Jalan

Untuk Pembangunan Perkerasan Jalan Desa tahun anggaran 2021 di Desa Cisimeut dengan anggaran sebesar Rp 150.000.000 dan realisasinya sebesar Rp 150.000.000. Adapun rincian untuk pembangunan pengerasan jalan Desa yaitu Honor tim pelaksanaan kegiatan yang di anggarkan dan di realisasikan sebesar Rp 3.600.000 artinya pemerintah desa untuk honor tim pelaksanaan kegiatan telah merealisasikan dana dengan efektif, kemudian upah tenaga kerja dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp 45.000.000 yang artinya pemerintrah desa telah merealisasikan secara efektif, bahan baku/material dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp 83.475.000 pemerintah desa cisimeut sudah efektif dalam merealisasikan bahan baku/material dan sewa peralatan yang di anggarkan dan di realisasikan sebesar Rp 17.925.000 artinya pemerintah desa telah merealisasikan dana secara efektif.

## 2. Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok

Pada tahun 2021 Pemerintah Desa menganggarkan Rp 60.076.000 dan merealisasikan Rp 60.076.000 untuk pembangunan jalan lingkungan paving blok yang artinya pemerintah desa sudah efektif dalam mereliasasikan dana desa tersebut. Adapun untuk pembiayaan pembangunan jalan lingkungan paving blok yaitu Belanja Modal – Administrasi Kegiatan sebesar Rp 60.076.000 artinya Belanja Modal – Administrasi Kegiatan telah merealisasikan dana dengan efektif.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Dana Desa yang dikelola Desa Cisimeut yaitu Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDesa) Kabupaten Lebak. Penggunaan Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik di Desa Cisimeut tersebut sudah transparan dengan adanya musyawarah seperti musyawarah dusun, musyawarah Desa dan telah dipublikasikan oleh pemerintah Desa Cisimeut seperti terdapat baliho transparansi APBDesa tahun 2021 di depan Kantor Desa Cisimeut yang dapat di akses oleh masyarakat Desa Cisimeut.

Kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah Desa Cisimeut pada tahun 2021 dapat terealisasi dan berjalan dengan baik.

Adapun faktor Pembangunan Fisik yang ada pada Pemerintah Desa Cisimeut terhambat karena kurangnya anggaran yang diterima dan telatnya penyaluran anggaran dari pemerintah pusat. Namun, pemerintah Desa Cisimeut tetap melaksanakan pembangunan yang sudah di anggarkan dan mempertanggungjawabkannya kepada pihak-pihak yang terlibat dan masyarakat.

Sesuai dengan indikator pengukuran dengan menggunakan rumus rasio efektivitas, bahwa dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan fisik Desa Cisimeut sudah dikelola secara efektif karena dapat dilihat dari hasil perhitungan diatas dapat mencapai angka 100%.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa sebagai pemegang tanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap pengelola yang secara langsung bertanggungjawab atas dana desa yang dikelolanya.

2. Saran bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan berperan aktif memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemerintah desa agar pelaksanaan pembangunan desa dapat tepat sasaran. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah desa juga dapat mempengaruhi keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

### 3. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian sejenis, dan diharapkan pula dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperluas dan menambah pengetahuan baru sehingga hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.
- 2) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi terkait dengan efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan agar hasil penelitian dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
- 3) Penelitian selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data dan segala sesuatunya sehingga peneliti dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, S. (2021). Tata Kelola Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, DIY. Retrieved From [http://repo.apmd.ac.id/1503/1/SONIA%20APRIANI\\_17520164.pdf](http://repo.apmd.ac.id/1503/1/SONIA%20APRIANI_17520164.pdf)
- Desa, A., & Yuliansyah, R. (2016). Akuntansi Desa.
- Dewi, I, S. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Retrieved From <https://repository.radenintan.ac.id/7356/skripsi%20lengkap%20PDF.pdf>
- H, P. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Bolongbengkeng Utara Kabupaten Takalar. Retrieved From [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4303-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4303-Full_Text.pdf)
- Halim, Abdul, dan Kusufi, Syam. (2017). *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Puataka Ilmu
- Hasanah, Nuramalia, dan Fauzi, Achmad. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Majid, Jamaluddin. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Sulawesi Selatan: Pustaka Almaila.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masihad, A. (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017. Retrieved From <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9002/1/SKRIPSI%20LENGKAP.pdf>
- Muljana, B.S. (2001). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: UI-Press.
- Nurlailah, N. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Di Kecamatan Indralaya Dan Kecamatan Payaraman Kabupaten Organ Ilir. Retrieved From [https://repository.unsri.ac/6397/3/.RAMA\\_60201\\_01021381520142\\_00060\\_4730\\_0025037404\\_01.pdf](https://repository.unsri.ac/6397/3/.RAMA_60201_01021381520142_00060_4730_0025037404_01.pdf)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60. *Tentang Pengelolaan Dana Desa*.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019. *Tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Republik Indonesia. 1999. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Shuida, I Nyoman. (2016). *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabet.
- Sujarweni, Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarto. (1985). *Pelaksanaan Pembangunan Fisik*. Jakarta: Bhratara.
- Sulastri, N. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Retrieved From [http://www.academia.edu/36085793/SKRIPSI\\_EFEKTIVITAS\\_PENGELOLAAN\\_DANA\\_DESA\\_ADD\\_DALAM\\_MENINGKATKAN\\_PEMBANGUNAN\\_FISIK\\_DESA\\_LAKAPODO\\_KECAMATAN\\_WATOPUTE\\_KABUPATEN\\_MUNA](http://www.academia.edu/36085793/SKRIPSI_EFEKTIVITAS_PENGELOLAAN_DANA_DESA_ADD_DALAM_MENINGKATKAN_PEMBANGUNAN_FISIK_DESA_LAKAPODO_KECAMATAN_WATOPUTE_KABUPATEN_MUNA)
- Ulumudin, A. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016. Retrieved From <https://eprints.untirta.ac.id/937/1/EVALUASI%20DESA%20DI%20DESA>

[%20PUSER%20KECAMATAN%20TIRTAYASA%20KABUPATEN%20SERANG%20TAHUN%20202016%20-%20Copy.pdf](#)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

Winarianti, A. (2020). Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kabupaten Gowa. Retrieved From <http://repositori.uin-alaudin.ac.id/17879/1/Efektivitas%20Alokasi%20Dana%20Desa%20dalam%20Meningkatkan.pdf>

Wirata, Sujarweni. 2015. *Transparan Dalam Pengelolaan Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Baru press.

Yuliansyah, dan Rusmiato. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

Zamili, I, I, S. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Retrieved From <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/11595/1/161801001%20-%20IVOARTA%20IMMANUEL%20-%20Fulltext.pdf>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ega Permatasari

Alamat : Kp.Babalan Rt/Rw 004/004, Desa Cisimeut,  
Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi  
Banten

Tempat Tanggal Lahir : Lebak, 07 September 1998

Umur : 23 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan

- TK : TK Rengganis
- SD : SD Negeri 1 Cisimeut
- SMP : SMP Negeri 2 Leuwidamar
- SMA : SMA Negeri 1 Leuwidamar
- Perguruan tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 01 Juni 2022

Penulis,

Ega Permatasari



2	3	11	Peningkatan/Rehabilitasi/Peningkatan Perang Desa	Meningkatnya Infrastruktur Desa	1	Paket	60.075.000	1	Paket	60.075.000	1	60.075.000		
2	3	11	Peningkatan/Rehabilitasi/Peningkatan di Monev Jalur Desa Peningkatan Jalur Desa (Gorong, perbaikan dll)	Meningkatnya Infrastruktur Desa	1	Paket	323.000.000	1	Paket	323.000.000			323.000.000	
2	3	20	Peningkatan/Rehabilitasi/Peningkatan di (Monev) Capaian Desa Desa di Sarana/Prasarana (Dusun) (Saling Desa	Meningkatnya Infrastruktur Desa	1	Paket	13.000.000	1	Paket	13.000.000	1	13.000.000		
2	3	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup MUDA Desa	Meningkatkan Hasil Pengabdian Lahan Pekarangan Desa	##	Paket	26.100.000	12	Paket	26.100.000	1	26.100.000		
2	3	2	Peningkatan Informasi Publik Desa (Pemer, Radio dll)	Adanya Transliterasi dalam pengembangan pemerintahan	##	Paket	20.450.000	12	Paket	19.450.000	1	19.450.000		
2	3	3	Pembinaan dan Pengabdian Sarana/Prasarana Komunitas	Meningkatkan Kemudahan dalam Komunikasi	##	Paket	49.000.000	12	Paket	48.000.000	1	48.000.000		
<b>BIDANG PEMBINAAN STRUKTURAL</b>							<b>43.804.700</b>		<b>42.222.000</b>	<b>1</b>	<b>11.500.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>29.982.000</b>	
3	1	1	Pengembangan Kegiatan Pita Kreasi Desa	Terdapatnya Pita Kreasi Desa	1	Keg	14.250.000	1	Keg	11.500.000	1	11.500.000		
3	2	2	Pengembangan Festival Kebudayaan dan Kegiatan	Terdapatnya Festival Kebudayaan Desa	1	Keg	15.000.000	1	Keg	15.000.000			15.000.000	
3	2	3	Pembinaan Karang Taruna Desa	Terdapatnya Karang Taruna Masyarakat	1	Keg	5.000.000	1	Keg	5.000.000			5.000.000	
3	4	4	Pembinaan PKK	Terdapatnya Karangtengah PKK	1	Paket	3.854.700	1	Paket	3.132.000	1	1.940.000	3.592.000	
3	4	5	Pelatihan & Keterampilan Masyarakat	Terdapatnya Keterampilan Masyarakat	1	Paket	5.500.000	1	Paket	5.500.000	1		5.500.000	

<b>BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT</b>														
<b>BIDANG PERANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAR</b>														
5	1	1	Penanggulangan Bencana	Penganganan dan Penganganan Kejadian Luar Biasa	1	Paket		1	Paket					
5	3	1	Penanganan Kebutuhan Mendesak	Penganganan dan Penganganan Kejadian Luar Biasa	##	Paket	381.600.000	12	Bulan	381.600.000	1	381.600.000		
<b>JUMLAH BELANJA</b>							<b>1.634.798.639</b>		<b>1.604.978.594</b>	<b>830.216.025</b>	<b>349.395.933</b>	<b>425.366.638</b>		
<b>PEMBIAYAAN</b>														
6	1		Pemilihan Pembiayaan											
6	1	1	SILPA Tahun Sebelumnya		1	Tahun	26.179.069	1	Tahun	26.179.069	1			
6	2		Pengeluaran Pembiayaan				26.179.069	1	Tahun	26.179.069	1			
6	2	2	Penyertaan Modal Desa											
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>							<b>26.179.069</b>		<b>26.179.069</b>					
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>									<b>29.739.198</b>	<b>22.306.975</b>	<b>4.916.767</b>	<b>2.515.456</b>		

Ciamis, 11 Maret 2022  
Kepala Desa

JUHEDIN

## Lampiran 2

### Usulan RKPDesa Pembangunan Desa Cisimeut Tahun 2021

DAFTAR USULAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
TAHUN 2021

DESA : CISIMEUT  
KECAMATAN : LEUWIDAMAR  
KABUPATEN : LEBAK  
PROVINSI : BANTEN

NO	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Beyada Sumber Pembiayaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	A. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Kepala Desa	Desa Cisimeut	1 x 12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan		42.000.000	APBDes	
			2 Sekdes Non PNS	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan		31.500.000	APBDes	
			3 Kaur Umum	Desa Cisimeut	1 x 12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan		21.000.000	APBDes	
			4 Kaur Keuangan	Desa Cisimeut	1 x 12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan		21.000.000	APBDes	
			5 Kasl Pemerintahan & Trantib	Desa Cisimeut	1 x 12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan		21.000.000	APBDes	
			6 Kasl Ekwbang	Desa Cisimeut	1 x 12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan		21.000.000	APBDes	
		B. Tunjangan Masa Kerja dan Perangkat Desa	1 Kepala Desa	Desa Cisimeut	1 x 12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan		6.000.000	APBDes	
			2 Sekdes	Desa Cisimeut	1 x 12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan		3.600.000	APBDes	
			3 Kaur/Kasl	Desa Cisimeut	3 x 12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan		4.800.000	APBDes	
		C. Tunjangan Kompetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Kaur Keuangan	Desa Cisimeut	1x12	Org/kom/bln	Meningkatkan Kesejahteraan				
			2 Kasl Pem & Trantib	Desa Cisimeut	1x12	Org/kom/bln	Meningkatkan Kesejahteraan				
			3 Kasl Ekwbang	Desa Cisimeut	1x12	Org/kom/bln	Meningkatkan Kesejahteraan				
		D. Tunjangan Asuransi Pensiun Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Kepala Desa	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			12.000.000	APBDes
			2 Kaur Keuangan	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			2.400.000	APBDes
			3 Kasl Pem & Trantib	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			2.400.000	APBDes
			4 Kasl Ekwbang	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			2.400.000	APBDes

E. Tunjangan Kesehatan (BPJS) Kepala Desa dan Perangkat Desa	5 Kaur Umum	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			2.400.000	APBDes
	1 Kepala Desa	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			1.180.000	APBDes
	2 Kaur Keuangan	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			1.680.000	APBDes
	3 Kasl Pemerintahan & Trantib	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			336.000	APBDes
	4 Kasl Ekwbang	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			1.008.000	APBDes
	5 Kaur Umum	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			672.000	APBDes
F. Tunjangan Pendidikan Formal Kepala Desa dan Perangkat Desa	6 Bendahara Rutin	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			336.000	APBDes
	1 Kaur Keuangan	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			-	
	2 Kasl Ekwbang	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			-	
	3 Kaur Umum	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			-	
	4 Sekdes	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			-	
	5 Kaur Umum	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			-	
G. Tunjangan Ketenaga Kerjaan	1 Kepala Desa	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			240.000	APBDes
	2 Kaur Keuangan	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			240.000	APBDes
	3 Kasl Pemerintahan & Trantib	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			240.000	APBDes
	4 Kasl Ekwbang	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			240.000	APBDes
	5 Kaur Umum	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			240.000	APBDes
	6 Bendahara Rutin	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			-	
H. Operasional Pemerintahan Desa	1 Staf Desa	Desa Cisimeut	2x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			24.000.000	APBDes
	2 Ummas Desa	Desa Cisimeut	4x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			36.000.000	APBDes
	3 Insentif Mantri Desa	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			15.000.000	APBDes
	4 Petugas Data	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kesejahteraan			12.000.000	APBDes
	5 Petugas Kebersihan Desa	Desa Cisimeut	1x12	Org / Bln	Meningkatkan Kebersihan Desa			3.600.000	APBDes
	6 Insentif RT/RW								

		1. Insentif RT	Desa Cisimeut	33x12	Org / Bin	Meningkatkan kesejahteraan	78.200.000	APBDes
		2. Insentif RW	Desa Cisimeut	8x12	Org / Bin	Meningkatkan kesejahteraan	19.200.000	APBDes
		7. Alat Tulis Kantor	Desa Cisimeut	1	Paket/Tahun	Penunjang Operasional Pemerintahan Desa		
		8. Belanja Alat Kebersihan	Desa Cisimeut	1	Paket/Tahun	Penunjang Operasional Pemerintahan Desa		
		Perjalanan Dinas Kepala Desa & Perangkat Desa	Desa Cisimeut	3x12	Kegiatan	Penunjang Operasional Pemerintahan Desa		
		Pelatihan/Diklat Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Cisimeut	1	Paket/Tahun	Penunjang Operasional Pemerintahan Desa	5.000.000	APBDes
		Pemeliharaan dan Perbaikan Rutin Berkala Pemdes	Desa Cisimeut	1	Paket/Tahun	Penunjang Operasional Pemerintahan Desa	10.000.000	APBDes
		Pengadaan dan Perengkapan Peralatan Kantor Pemdes	Desa Cisimeut	1	Kegiatan	Penunjang Operasional Pemerintahan Desa	2.500.000	APBDes
		Penyusunan RKPDDes	Desa Cisimeut	1	Kegiatan	Penunjang Operasional Pemerintahan Desa	5.000.000	APBDes
		Penyusunan APBDes	Desa Cisimeut	1	Kegiatan	Penunjang Operasional Pemerintahan Desa	2.000.000	APBDes
		Penyusunan APBDes Perubahan	Desa Cisimeut	1	Kegiatan	Penunjang Operasional Pemerintahan Desa	2.500.000	APBDes
		Penyusunan LPPDes dan LKPI Desa TA. 2016	Desa Cisimeut	1	Kegiatan	Penunjang Operasional Pemerintahan Desa		
		Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat	Desa Cisimeut	1	Kegiatan	Penunjang Operasional Pemerintahan Desa	2.500.000	APBDes
		Musrenbangdes	Desa Cisimeut	1	Kegiatan	Penunjang Operasional Pemerintahan Desa	5.000.000	APBDes
		Murdes	Desa Cisimeut	1	Kegiatan	Adanya data yang akurat dan baru setiap tahun	16.400.000	APBDes
		1. Operasional BPD	Desa Cisimeut			Meningkatkan Kinerja BPD	13.243.270	APBDes
		I. Operasional RPD					455.055.270	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	A. Sub Bidang Pendidikan						
		1. Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 1 Cisimeut	Kp. Sindangraret	1	Unit	Meningkatkan kenyamanan dalam belajar	125.000.000	APBDes
		2. Pembangunan fasilitas Parkir SD 1 Cisimeut	Kp. Sindangraret	100	Meter	Meningkatkan kerapian halaman parkir	50.000.000	APBDes
		3. Bantuan Stimulan Sarpras PAUD	Desa Cisimeut	2	Ruang	Meningkatkan pendidikan usia dini	20.000.000	APBDes

	B. Sub Bidang Kesehatan	4. Pembangunan Sarana Posyandu	Tersebar	7	Unit	Meningkatkan kenyamanan Pelayanan Posyandu	100.000.000	APBDes
		5. Pemeliharaan Gedung Puskesmas Pembantu	Desa Cisimeut	1	Paket	Memfasilitasi tingkat kenyamanan pelayanan	10.000.000	APBDes
		6. Posyandu Mandiri	Desa Cisimeut	1	Paket	Meningkatkan kesehatan balita	5.000.000	APBDes
		7. Penyuluhan kesehatan Gizi, KB, dan Imunisasi	Desa Cisimeut	1	Paket	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	10.000.000	APBDes
		8. Pembangunan Sanitasi ( Jamban, Air Bersih dll)	Desa Cisimeut	1	Paket	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	10.000.000	APBDes
		9. Jaminan Kesehatan Bumi	Desa Cisimeut	1	Paket	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	5.000.000	APBDes
		10. Kesehatan Lingkungan	Desa Cisimeut	1	Paket	Meningkatkan kesehatan masyarakat sekitar	5.000.000	APBDes
		11. Pencapaian SDGS dalam situasi dan kondisi pandemi covid-19	Desa Cisimeut	1	paket	Meningkatkan kesehatan masyarakat sekitar	150.000.000	
		12. Penyelenggaraan Posyandu ( Tambahan makanan, Lansia, Bumil, Insentif, obat gizi dan alat antropometri)	Desa Cisimeut	1	Paket	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	45.000.000	APBDes
	C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13. Perkerasan Jalan	Tapos	1000	Meter	Memperlancar Transportasi Masyarakat	200.000.000	APBDes
		14. Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok	Kp. Kipar, Sukrahmat, Cikakak, Cipeuyah Barat	500	Meter	Memperlancar Transportasi Masyarakat	318.750.000	APBDes
		16. Rehabilitasi/ pembangunan Jaringan/saluran Irigasi	Pasir Eurih	150	Meter	Memperlancar Saluran Perairan	90.000.000	APBDes
		18. TPT	Kp. Babalan			Memperlancar saluran air	69.000.000	APBDes
		19. Pembangunan Lapan Jalan ( Rehab )	Sindangraret- Bantarnaga	1250	Meter	Memperlancar Transportasi Masyarakat	150.000.000	APBDes
	D. Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20. Pembangunan Rumah Layak Tidak Huni	Tersebar	195	Unit	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	200.000.000	APBDes
	E. Sub Bidang Ketahanan dan Lingkungan Hidup	21. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Cisimeut	1	Unit		23.650.000	APBDes
	F. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi & Informatika	22. Pembuatan & Pengelolaan Jaringan Informasi Desa/Publikasi dan pelaporan	Desa Cisimeut	1	Paket	Meningkatkan Informasi yang lebih untuk masyarakat	10.000.000	APBDes
						Jumlah Per Bidang 2	1.596.400.000	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	A. Sub Bidang Ketentraman						
		1. Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi Kepada Masyarakat	Desa Cisimeut	1	Kegiatan/Tthn	Meningkatkan pengetahuan masyarakat	4.000.000	APBDes
		2. Bantuan Stimulasi Sarana dan Prasarana keagamaan	Desa Cisimeut	2	Paket	Meningkatkan Kesejahteraan Keagamaan	13.000.000	APBDes

		3	Pemilihan Pilkada 2021	Desa Cisimeut	1	Kegiatan	Meningkatkan Keagamaan	50.000.000	APBDes	
		4	PHBI	Desa Cisimeut	1	Kegiatan/Thn	Meningkatkan Hari Besar Nasional	10.000.000	APBDes	
		5	PHBN	Desa Cisimeut	1	Kegiatan/Thn	Meningkatkan Hari Besar Nasional	10.000.000	APBDes	
	B. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6	Pembinaan PKK					10.000.000	APBDes	
							Jumlah Per Bidang 5	97.000.000		
4	A. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pengembangan Padi)	Desa Cisimeut	12	Kg	Mensejahterakan masyarakat dengan adanya pengembangan padi	6.000.000	APBDes	
		2	Pengembangan perbibitan & perbibitan Bibit Karet	Desa Cisimeut	500	pohon	Meningkatkan penanaman Pohon Albasiah dll	7.500.000	APBDes	
		3	Pengembangan agribisnis peternakan (ternak bebek)	Desa Cisimeut	100	ekor	Meningkatkan ternak bebek unggulan	12.500.000	APBDes	
		4								
		5								
	B. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Desa Cisimeut	1	Paket	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	15.000.000	APBDes	
	H. Bantuan Propinsi Penunjang Pemerintahan Desa & Kelembagaan	1	Banprop	Desa Cisimeut	1	Paket	Membantu Kegiatan Lembaga dan Pemerintahan di Desa	50.000.000	APBDes	
	I. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Bantuan BLT DD	Desa Cisimeut	1	Paket	Membantu warga yang terkena bencana	300.000.000	APBDes	
		2	Bantuan Stimulasi Penanggulangan Bencana Skala Desa	Desa Cisimeut	1	Paket	Membantu warga yang terkena bencana	19.821.200	APBDes	
							Jumlah Per Bidang 4	410.821.200		
							JUMLAH TOTAL	2.559.276.470		



Desa Cisimeut, 07 Agustus 2020  
 Disusun Oleh  
 Tim Penyusun RPDes  
 JAJANG ROPANDI  
 NRPDes: 198608082006031046

### Lampiran 3

### Pembangunan Fisik Desa yang Terlaksana di Desa Cmisimeut Tahun 2021

BUKU INVENTARIS PROYEK					
Model D.3.					
NO.	JENIS / NAMA PROYEK	VOLUME	BIAYA	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Paving Blok	337 x 1.00 m	60.076.000	Kipar - Cikana	DD
2.	Pertverasan Jalan	780 x 2,5 m	150.00.000	Tapos	DD
3.	Lapen		325.00.000	Cipeuyah - mawa	APBD
4.	Sumur Bor			Kp. Hantar	
5.	PKTD STBM Plus/Santasi Lungkungan	15 KPM	150.00.000	Tersebar	APBD Provinsi
6.	Bedah Rumah 20 KPM	20 KPM	300.00.000	Tersebar	APBD Kab
7.	Jalan Lunghungan Purus Blok	450 Meter	189.290.000	Kp. Bantarnaga	APBD-P Provinsi

Cisimeut 2021

MENGETAHUI  
 KEPALA DESA .....

SEKRETARIS DESA .....

Lampiran 4  
Dokumentasi



